

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRESTA
PADANG TERHADAP KEGIATAN USAHA NIAGA BAHAN
BAKAR MINYAK JENIS *PERTALITE* TANPA IZIN USAHA DI
MASYARAKAT**

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

MHD. QORI AL-KARIM

2210112042

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing:

Dr. Nilma Suryani S.H., M.H

Felia Hermayenti S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026



No. Alumni Universitas	Mhd. Qori Al-Karim	No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi/ 14 Oktober 2003	f. Tanggal Lulus : 20 April 2026	
b. Nama Orangtua : Asrul	g. Predikat Lulus : Dengan Pujian	
c. Fakultas : Hukum	h. Lama Studi : 3 Tahun 7 Bulan	
d. PK : Hukum Pidana	i. IPK : 3,64	
e. No. BP : 2210112042	j. Alamat : Nagari Sariak, Sungai Pua, Kabupaten Agam	

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRESTA PADANG TERHADAP KEGIATAN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK JENIS PERTALITE TANPA IZIN USAHA DI MASYARAKAT
Mhd. Qori Al-Karim, 2210112042, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Khusus Hukum Pidana (PK IV), 89
 Halaman, 2026

ABSTRAK

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan Undang- Undang yang mengatur Kegiatan Usaha Migas dari hulu hingga hilir guna menjamin ketersediaan energi dan agar energi dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat dengan memberikan kompensasi. Pengaturan mengenai Kegiatan Usaha Migas seringkali tidak diterapkan di masyarakat sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum seperti Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa izin di masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan penyimpangan distribusi BBM yang diberikan kompensasi oleh pemerintah, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan, kerugian negara, serta berpotensi menghambat pemerataan akses BBM bagi masyarakat. Penelitian ini merumuskan tiga pokok masalah, yakni: pelaksanaan penegakan hukum oleh Polresta Padang terhadap kegiatan usaha niaga pertalite tanpa izin; kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum; serta upaya yang dilakukan Polresta Padang dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis praktik penegakan hukum tersebut secara empiris. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena ini terjadi karena keterbatasan ekonomi, harga *pertalite* yang murah, pengawasan SPBU pengisian BBM yang tidak ketat. Banyak cara yang digunakan masyarakat untuk dapat memperoleh BBM jenis *pertalite* baik dengan membeli secara langsung atau bekerjasama dengan petugas pengisi BBM yang melakukan penyalahgunaan tugas. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Padang dilakukan melalui upaya preventif seperti sosialisasi kepada masyarakat, dan patroli di wilayah Kota Padang yang rawan terjadi tindak pidana, serta upaya represif berupa penindakan langsung berdasarkan temuan lapangan atau laporan masyarakat yang dilanjutkan dengan memproses laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka sampai dengan pelimpahan perkara ke kejaksanaan. Penegakan hukum menghadapi beberapa kendala, baik internal seperti keterbatasan personel, anggaran, sarana, dan luasnya wilayah hukum; maupun eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan SPBU, maraknya praktik perolehan BBM secara melawan hukum, hingga faktor ekonomi pelaku. Upaya penanggulangan dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan SPBU, optimalisasi patroli, pemetaan titik rawan, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penegakan hukum sudah berjalan namun belum optimal, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan sinergi antar instansi, serta pembinaan berkelanjutan kepada masyarakat agar tujuan kompensasi BBM tepat sasaran dan tercipta ketertiban dalam distribusi *pertalite*.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepolisian, Usaha Niaga Tanpa Izin, Pertalite.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 20 April 2026
 Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Mhd. Qori Al-Karim	Iwan Kurniawan, S.H., M.H	Yandriza, S.H., M.H

Mengetahui,
 Ketua Departemen Hukum Pidana : **Riki Afrizal, S.H., M.H**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:



Alumni University Number	Mhd. Qori Al-Karim	Alumni University Number
a. Place/Date of Birth : Bukittinggi / 14 th Oct 2003		f. Graduation Date : 20 th April 2026
b. Parent's Name : Asrul		g. Pass Predicate : Cumlaude
c. Faculty : Law		h. Length of Study : 3 years 7 month
d. Concentration : Criminal Law		i. GPA : 3.64
e. Student ID : 2210112042		Address : Nagari Sariak, Sungai Pua, Kabupaten Agam

IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT BY THE PADANG POLICE AGAINST PERTALITE FUEL OIL TRADING BUSINESS ACTIVITIES WITHOUT A BUSINESS LICENSE IN THE COMMUNITY

(Mhd. Qori Al-Karim, 2210112042, Faculty of Law, Criminal Law, Andalas University, 89 pages, 2026)

ABSTRACT

Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas (Migas) is a law that regulates Oil and Gas Business Activities from upstream to downstream to ensure the availability of energy and so that energy can be accessed by all circles of society by providing compensation. Regulations regarding Oil and Gas Business Activities are often not applied in the community, causing illegal acts such as Fuel Oil (BBM) Business Activities Without Permits in the community. This phenomenon not only causes irregularities in the distribution of fuel that is compensated by the government, but also poses safety risks, state losses, and has the potential to hinder equitable access to fuel for the community. This study formulates three main problems, namely: the implementation of law enforcement by the Padang Police against pertalite business activities without a license; obstacles faced in the implementation of law enforcement; as well as the efforts made by the Padang Police in overcoming these obstacles. This study aims to describe and analyze the law enforcement practice empirically. The method used is empirical juridical with the nature of analytical descriptive research through field studies and literature studies. The results of the study show that this phenomenon occurs due to economic limitations, low pertalite prices, and non-strict supervision of petrol stations. There are many ways that the public uses to be able to obtain pertalite fuel, either by buying directly or by collaborating with fuel filling officers who abuse their duties. Law enforcement carried out by the Padang Police is carried out through preventive efforts such as socialization to the community, and patrols in areas of Padang City that are prone to criminal acts, as well as repressive efforts in the form of direct action based on field findings or community reports which are continued by processing reports, investigations, investigations, examination of witnesses and suspects until the transfer of cases to the prosecutor's office. Law enforcement faces several obstacles, both internal such as limited personnel, budget, facilities, and the breadth of the jurisdiction; as well as external factors such as low public legal awareness, weak supervision of petrol stations, the rampant practice of illegal fuel acquisition, and the economic factors of the perpetrators. Countermeasures are carried out through increased coordination with petrol stations, optimization of patrols, mapping of vulnerable points, and legal education to the public. The conclusion of the study emphasizes that law enforcement has been running but is not optimal, so it is necessary to strengthen supervision, increase synergy between agencies, and continue to provide guidance to the community so that the goal of fuel compensation is on target and order is created in the distribution of pertalite.

Keywords: Law Enforcement, Police, Unlicensed Commercial Business, Pertalite.

This minor thesis has defended in front of the examiner team at, April 20th, 2026.

Examiner,

Signature 	Examiner I 	Examiner II
Mhd. Qori Al-Karim	Iwan Kurniawan, S.H., M.H	Yandriza, S.H., M.H

Acquainted,

Head of the Department of Criminal Law: **Riki Afrizal, S.H., M.H**

Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: